



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **13** /HARGA/BPH MIGAS/KOM/2022

TENTANG

PENETAPAN HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN
GOLONGAN RUMAH TANGGA 2 DAN PELANGGAN KECIL 2
PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI GAS PROGRAM SAYANG IBU
NON ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN)
YANG DIBANGUN MULAI TAHUN 2021
DI PROVINSI DKI JAKARTA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara ekonomi kerakyatan;

b. bahwa untuk mendorong percepatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, perlu penetapan harga jual gas bumi sebagai bentuk kepastian hukum untuk masyarakat;

c. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 06/BA-SID/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 08 Februari 2022;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penetapan Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Golongan Rumah Tangga 2 dan Pelanggan Kecil 2 Pada Jaringan Pipa Distribusi Gas Program Sayang Ibu Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang Dibangun Mulai Tahun 2021 di Provinsi DKI Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan

dan ...

- dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 509);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169);
 10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN GOLONGAN RUMAH TANGGA 2 DAN PELANGGAN KECIL 2 PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI GAS PROGRAM SAYANG IBU NON ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) YANG DIBANGUN MULAI TAHUN 2021 DI PROVINSI DKI JAKARTA.

KESATU: ...

- KESATU : Menetapkan Harga jual Gas Bumi melalui pipa yang dijual oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk konsumen Golongan Rumah Tangga 2 (RT-2) dan Pelanggan Kecil 2 (PK-2) pada Jaringan Pipa Distribusi Gas Program Sayang Ibu Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dibangun mulai tahun 2021 di Provinsi DKI Jakarta, terdiri:
- a. Rumah Tangga 2 (RT-2) maksimum Rp10.000/M³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik); dan
 - b. Pelanggan Kecil 2 (PK-2) maksimum Rp10.000/M³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik).
- KEDUA : Konsumen Golongan Rumah Tangga 2 (RT-2) dan Pelanggan Kecil 2 (PK-2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Rumah Tangga 2 (RT-2) meliputi rumah menengah, rumah mewah, apartemen, dan sejenisnya; dan
 - b. Pelanggan Kecil 2 (PK-2) meliputi hotel, restoran/rumah makan, rumah sakit swasta, perkantoran swasta, lembaga pendidikan swasta, pertokoan/ruko/rukan/pasar/mall/swalayan dan kegiatan komersial sejenisnya.
- KETIGA : Penerapan harga jual Gas Bumi oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan secara bertahap.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : PT Perusahaan Gas Negara Tbk, berkewajiban:
- a. melaksanakan sosialisasi harga jual Gas Bumi melalui pipa dan edukasi manfaat layanan Jaringan Distribusi Gas Program Sayang Ibu Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk golongan konsumen Rumah Tangga 2 dan Pelanggan Kecil 2;
 - b. memberikan pelayanan sesuai dengan standar mutu layanan kepada konsumen;
 - c. meningkatkan standar mutu pelayanan;
 - d. memberikan jaminan volume pasokan dan tekanan Gas Bumi;
 - e. memberikan kompensasi kepada konsumen, dalam hal Badan Usaha tidak memberikan layanan sesuai dengan mutu layanan; dan
 - f. menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur atas pelaksanaan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Harga gas bumi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali atau apabila dianggap perlu.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil untuk Jaringan Pipa Distribusi Gas yang Dibangun Pemerintah dan Jaringan Gas Program Sayang Ibu Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dibangun sebelum Tahun 2021, masih tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa untuk Konsumen

Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa
Distribusi Provinsi DKI Jakarta.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Februari 2022

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, KESDM;
3. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk; dan
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.